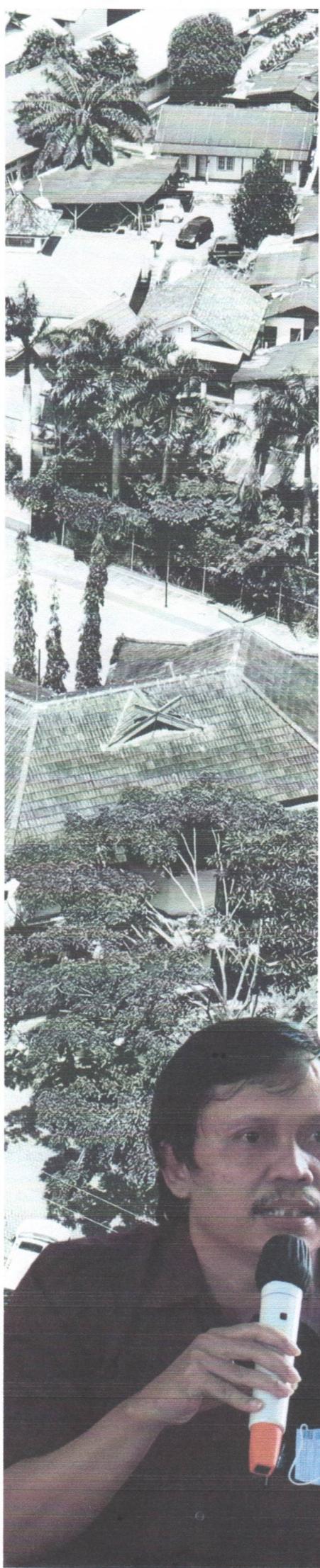




Rencana Kerja 2024

BPHL WILAYAH IV JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi tahun anggaran 2024 disusun sebagai pedoman, arahan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan kerja satuan kerja/organisasi lingkup Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi dan sekaligus sebagai alat pengendali kegiatan. Sehubungan dengan telah disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-029.03.2.426882/2024 tanggal 24 November 2023, maka BPHL Wilayah IV Jambi sebagai satuan kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 dengan berpedoman pada Revisi Rencana Strategis BPHL Wilayah IV Jambi 2020 s.d. 2024 dan Kertas Kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja ini memuat kegiatan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi BPHL Wilayah IV Jambi yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini diucapkan terima kasih.

Jambi, Desember 2023

Kepala Balai,



Wahyu Nuhidayat, S.Hut, M.Sc
NIP. 19700901 200003 1 004

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, VISI MISI.....	3
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	5
D. GAMBARAN UMUM WILAYAH KERJA.....	10
BAB II. CAPAIAN KINERJA	32
A. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023.....	32
B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023	36
BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2024	40
A. STRATEGI DALAM MEMBANGUN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024.....	40
B. PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2024	41
PENUTUP	53
L A M P I R A N.....	54



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keadaan Pegawai BPHL Wilayah IV Jambi Menurut Jabatan	6
Tabel 2. Keadaan PNS BPHL Wilayah IV Jambi.....	6
Tabel 3. Keadaan PPK BPHL Wilayah IV Jambi	7
Tabel 4. Keadaan Pegawai BPHL Wilayah IV Jambi.....	7
Tabel 5. Pejabat Fungsional pada BPHL Wilayah IV Jambi	8
Tabel 6. Luas Kawasan Hutan Provinsi Jambi	10
Tabel 7. Daftar KPH di Provinsi Jambi	11
Tabel 8. Daftar PBPH di Provinsi Jambi.....	13
Tabel 9. Daftar Permohonan PBPH Baru di Provinsi Jambi	15
Tabel 10. Daftar PBPHH di Provinsi Jambi	16
Tabel 11. Jumlah GANISPH Per Kualifikasi	30
Tabel 12. Hasil Penilaian Kinerja GANISPH di Provinsi Jambi pada tahun 2023	31
Tabel 13. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	33
Tabel 14. Realisasi Rencana Aksi BPHL Wilayah IV Jambi Tahun 2022	34
Tabel 15. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2023	34
Tabel 16. Rincian Realisasi anggaran tahun 2022.....	36
Tabel 17. Prognosis Capaian Anggaran Tahun 2023.....	38
Tabel 18. Rencana Operasional BPHL Wilayah IV Jambi	42
Tabel 19. Struktur anggaran per kegiatan.....	46





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Strategi Prioritas Nasional.....40





BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan pembangunan kehutanan saat ini lebih diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan. Hutan yang memiliki manfaat ekologi, sosial dan ekonomi merupakan modal pembangunan nasional karena manfaatnya tersebut nyata bagi masyarakat dan kehidupan bangsa Indonesia. Pemanfaatan hutan secara lestari dan berkesinambungan menjadi kewajiban untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia secara berkeadilan, tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk yang akan datang.

Dari sisi pembangunan ekonomi, sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan negara, dan perolehan devisa secara nyata. Dari sisi pembangunan lingkungan, sektor kehutanan baik langsung maupun tidak langsung, dituntut untuk dapat memberikan dukungan untuk terselenggaranya pembangunan sektor lain (pertanian dan pangan, pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, keuangan/perbankan, infrastruktur pekerjaan umum, pariwisata dan lain-lain) secara berkelanjutan. Dalam konteks sisi pembangunan lingkungan ini, peran kehutanan sangat nyata dalam lingkup regional/lokal, nasional dan global terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pemanfaatan hutan semaksimal mungkin bagi kesejahteraan masyarakat tersebut memberi kelonggaran bagi usaha pemanfaatan kawasan hutan, bahwa pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

Bahkan, kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru pun masih bisa dimanfaatkan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga dengan hutan lindung juga dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dan Hutan produksi





dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pengelolaan kawasan hutan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang terdapat di dalamnya, harus dilaksanakan secara tepat, cermat dan terencana. Hal ini tentu saja membutuhkan kerjasama yang baik antar stakeholders yang terlibat langsung di dalamnya. Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV Jambi sebagai salah satu Unit Pelaksana Tugas (UPT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus dapat ikut serta berperan aktif untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dikemukakan di atas.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.

Sasaran program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari antara lain :

1. Menurunnya laju penyusutan hutan.
2. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan.
3. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting.
4. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata.
6. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien

Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ini adalah :

1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan (Ha).
2. Jumlah produksi kayu bulat (m³).
3. Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan (USD).
4. Meningkatnya PNBPN dari Pemanfaatan Hutan (Triliun)



5. Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat (Ha).
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK.

Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV Jambi adalah mendukung kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari agar semua kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, mencapai tujuan dan sasaran serta memenuhi indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahun berjalan (tahun 2024) dengan optimal, efektif dan efisien, maka diperlukan suatu rencana kerja yang tersusun dalam Rencana Kerja (RENJA) BPHL Wilayah IV Jambi Tahun 2024.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, VISI MISI

Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi adalah unit pelaksana teknis di bidang pemantauan hutan produksi dan hutan lindung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari bahwa tugas pokok BPHL Wilayah IV Jambi adalah melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsi BPHL Wilayah IV Jambi sebagai berikut:

1. Fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
2. Fasilitasi kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
3. Pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
4. Penugasan, pemantauan, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan; dan



- 
5. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Dalam rangka mendukung kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, melalui penyeragaman nomenklatur Program Dukungan Manajemen dan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, maka BPHL Wilayah IV Jambi sebagai bagian integral dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari memiliki **visi** “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Sesuai dengan visi di atas, maka **misinya** ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

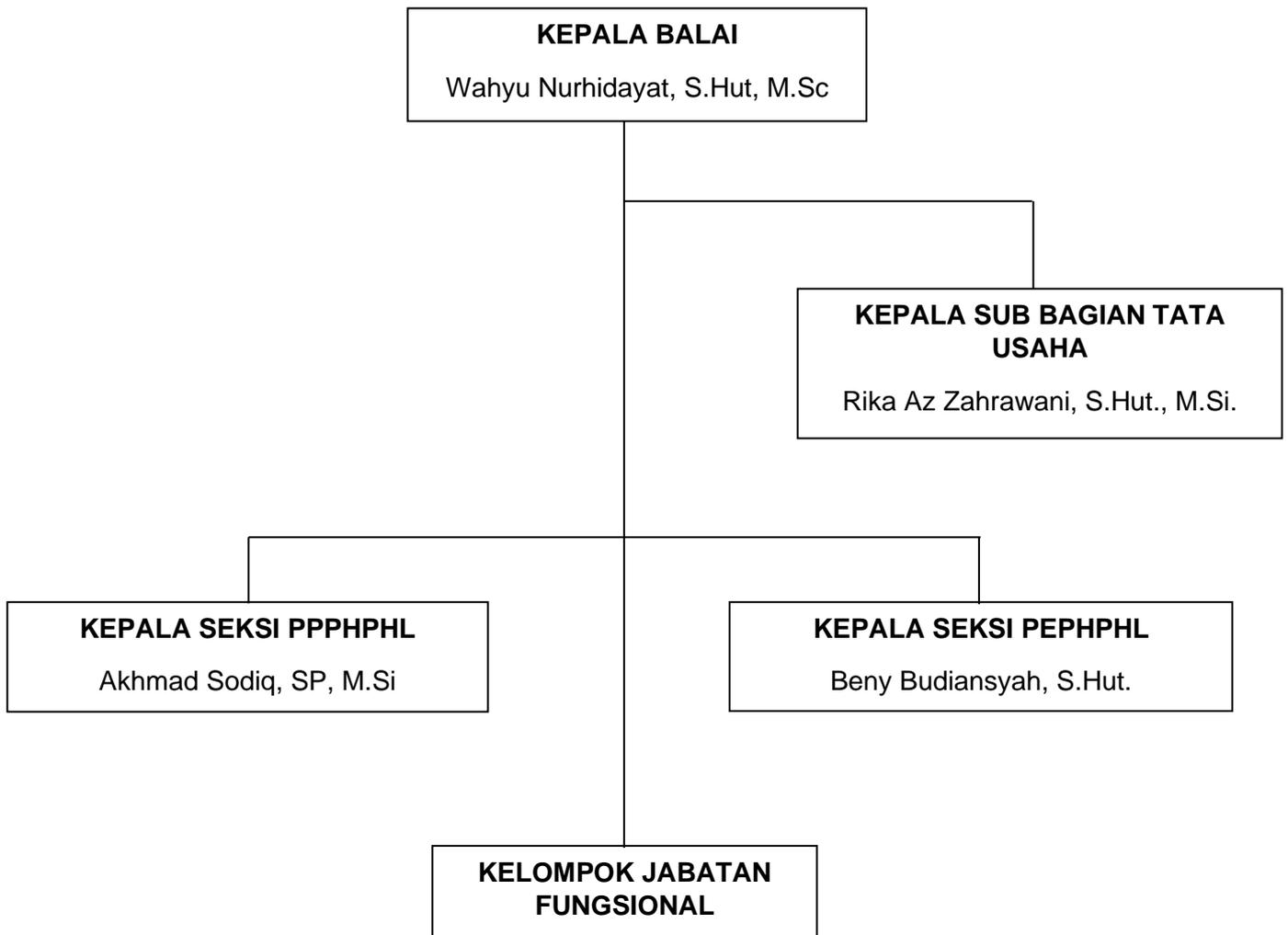




C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari, struktur organisasi BPHL Wilayah IV Jambi dapat digambarkan sebagaimana bagan berikut :

Bagan 1. Struktur Organisasi BPHL Wilayah IV Jambi



Pegawai BPHL Wilayah IV Jambi per Desember 2023 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang terdiri 42 (empat puluh dua) orang PNS, dan 7 (tujuh) orang PPNPN. Keadaan pegawai BPHL Wilayah IV Jambi menurut jabatan, pangkat/golongan ruang dan tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 1, 2 dan 3.



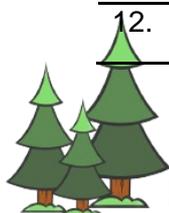
Tabel 1. Keadaan Pegawai BPHL Wilayah IV Jambi Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)		Jumlah (Orang)
		L	P	
1.	Kepala Balai	1	-	1
2.	Kasubag Tata Usaha	-	1	1
3.	Kasi Perencanaan, Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1	-	1
4.	Kasi Pemantauan, Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1	-	1
5.	Kelompok Fungsional	10	12	22
6.	Non Struktural	14	2	16
7.	PPNPN	6	1	7
Total		33	16	49

Sumber : SIMPEG KLHK 2023 diolah

Tabel 2. Keadaan PNS BPHL Wilayah IV Jambi

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (Orang)		Jumlah (Orang)
		L	P	
1.	Pembina Utama, IV/e	-	-	-
2.	Pembina Utama Madya, IV/d	-	-	-
3.	Pembina Utama Muda, IV/c	-	-	-
4.	Pembina Tk. I, IV/b	1	-	1
5.	Pembina, IV/a	5	3	8
6.	Penata Tk. I, III/d	9	4	13
7.	Penata, III/c	2	1	3
8.	Penata Muda Tk. I, III/b	2	4	6
9.	Penata Muda, III/a	5	1	6
10.	Pengatur Tk. I, II/d	-	-	-
11.	Pengatur, II/c	2	1	3
12.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	-	-	-



No	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (Orang)		Jumlah (Orang)
		L	P	
13.	Pengatur Muda, II/a	2	-	2
14.	Juru Tk. I, I/d	-	-	-
15.	Juru, I/c	-	-	-
16.	Juru Muda Tk. I, I/b	-	-	-
17.	Juru Muda, I/a	-	-	-
Total		28	14	42

Sumber : SIMPEG KLHK 2023 diolah

Tabel 3. Keadaan PPK BPHL Wilayah IV Jambi

No	Golongan	Jumlah (Orang)		Jumlah (Orang)
		L	P	
1.	V	-	-	-
2.	VI	-	-	-
3.	VII	-	-	-
4.	VIII	-	-	-
5.	IX	-	1	1
Total		0	1	1

Sumber : SIMPEG KLHK 2023 diolah

Tabel 4. Keadaan Pegawai BPHL Wilayah IV Jambi

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)		Jumlah (Orang)
		L	P	
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP/Sederajat	1	-	1
3.	SLTA/Sederajat	-	-	-
	a. SKMA/Sekolah Kehutanan sederajat	3	-	3
	b. SLTA/Sederajat lainnya	9	1	10
4.	D1	-	-	-



No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)		Jumlah (Orang)
		L	P	
5.	D2	-	-	-
6.	D3	2	1	3
7.	S1/D4	-	-	-
	a. Kehutanan	2	5	7
	b. Non Kehutanan	7	6	13
8.	Pasca Sarjana (S2)	10	2	12
9.	Doktor (S3)	-	-	-
Total		34	15	49

Sumber : SIMPEG KLHK 2023 diolah

Selain pegawai yang menduduki jabatan struktural dan non struktural, pada BPHL Wilayah IV Jambi terdapat 24 (dua puluh empat) pegawai jabatan fungsional, yang terdiri atas jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) di bawah binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jabatan fungsional Keuangan APBN di bawah binaan Kementerian Keuangan dan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di bawah binaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Rincian lebih lengkap jabatan fungsional BPHL Wilayah IV Jambi dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Pejabat Fungsional pada BPHL Wilayah IV Jambi

No	Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)		Jumlah (Orang)
		L	P	
A. Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)				
1.	PEH Madya	2	1	3
2.	PEH Muda	7	5	12
3.	PEH Pertama	0	3	3
5.	PEH Penyelia	-	-	-
6.	PEH Mahir	-	-	-



No	Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)		Jumlah (Orang)
		L	P	
7.	PEH Terampil	1	1	2
8.	PEH Pemula	2	-	2
B. Keuangan APBN				
1.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	-	1	1
2.	Pranata Keuangan APBN Terampil	-	-	-
C. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa				
1.	Pengelolaan Pengadaan B/J Pertama	1	-	1
Jumlah		13	11	24

Sumber : SIMPEG KLHK 2023 diolah





D. GAMBARAN UMUM WILAYAH KERJA

a. Luas Kawasan Hutan

Luas kawasan hutan di Provinsi Jambi berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6613/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 seluas 2.124.352 Ha. Total kawasan hutan di Provinsi Jambi memiliki persentase 43,3% dari seluruh luas total Provinsi Jambi.

Tabel 6. Luas Kawasan Hutan Provinsi Jambi

No	Fungsi Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Produksi	954.012
2	Hutan Lindung	180.792
3	Hutan Produksi Konversi	11.062
4	Hutan Produksi Terbatas	264.398
5	Hutan Konservasi	714.088
Total Luas		2.124.352 Ha

Sumber : SK.6613/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

b. Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Jambi terbagi ke dalam fungsi Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) didominasi oleh fungsi HP seluas ± 954 Ribu Hektar dan kawasan Hutan Lindung seluas ±180 ribu hektar. Pengelolaannya dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan yang berada di setiap kabupaten di Provinsi





Jambi. KPH merupakan unit pengelola hutan terkecil yang berada di tingkat tapak yang akan mengelola sumber daya hutan secara efektif, efisien dan Lestari mulai dari penataan, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan reklamasi, hingga melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.77/Menhut-II/2010 Provinsi Jambi memiliki 16 unit KPHP dan 1 Unit KPHL yang dikelola oleh 11 UPTD KPHP.

Tabel 7. Daftar KPH di Provinsi Jambi

NO	NAMA KPHP	KAB.	LUAS (HA)	SK PENGESAHAN RPHJP
1	KPHP Unit I Kerinci	Kerinci	34.250	SK.1983/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2017 tanggal 10 April 2017
2	KPHP Unit II Bungo	Bungo	49.760	SK.8658/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2018 tanggal 17 Desember 2018
3	KPHP Unit III Bungo	Bungo	69.615	SK.10485/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019 tanggal 27 Desember 2019
4	KPHP Unit IV Merangin	Merangin	51.026	SK.4764/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2020 tanggal 12 Agustus 2020
5	KPHP Unit V Merangin	Merangin	53.412	SK.4779/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2020 Tanggal 12 Agustus 2020
6	KPHP Unit VI Merangin	Merangin	65.160	SK.321/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018 tanggal 7 Feb 2018
7	KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Sarolangun	121.102	SK.198/Menhut-II/Reg.1/2014, tanggal 29 Januari 2014 (Review)



NO	NAMA KPHP	KAB.	LUAS (HA)	SK PENGESAHAN RPHJP
8	KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Sarolangun	109.765	SK.1450/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018 tanggal 3 April 2018
9	KPHP Unit IX Tebo Barat	Tebo	148.685	SK.2419/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018 tanggal 25 April 2018
10	KPHP Unit X Tebo Timur	Tebo	106.456	SK.4748/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/7/2018 tanggal 13 Juli 2018
11	KPHP Unit XI Batanghari	Batanghari	107.671	SK.7524/MENLHK-PHL/BRPH/HPL.0/7/2023
12	KPHP Unit XII Batanghari	Batanghari	80.509	Belum Pengesahan RPHJP
13	KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Muaro Jambi	103.271	SK.8567/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2018 tanggal 17 Desember 2018
14	KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	Tanjung Jabung Timur	77.402	SK.10483/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019 Tanggal 27 Desember 2019
15	KPHP Unit XV Tanjung Jabung Barat	Tanjung Jabung Barat	91.091	Belum Pengesahan RPHJP
16	KPHP Unit XVI Tanjung Jabung Barat	Tanjung Jabung Barat	123.588,65	SK.10482/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019 tanggal 27 Desember 2019
17	KPHL Unit XVII Tanjung Jabung Barat	Tanjung Jabung Barat	15.965	SK.5429/MENLHK/KPHL-PKHPL/DAS3/10/2017 Tanggal 18 Oktober 2017





c. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Areal Hutan Produksi di Provinsi Jambi tersebut telah dibebani izin sebanyak 23 unit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan luas 809.552 Ha terdiri dari 19 unit PBPH Pemanfaatan Hasil Hutan Hayu Hutan Tanaman, 2 (dua) unit PBPH Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan 2 (dua) Unit PBPH Pemulihan Lingkungan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 8. Daftar PBPH di Provinsi Jambi

No	Nama Pemegang Izin	Nomor SK	Lokasi	Luas (Ha)
1	PT. Wira Karya Sakti	SK.1141/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Muaro Jambi, Batanghari, Tanjabtim, Tanjabbar	287.166
2	PT. Tebo Multi Agro	SK.1119/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Tebo	19.200
3	PT. Wanamukti Wisesa	SK.1238/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021	Tebo	9.105
4	PT. Lestari Asri Jaya	SK.1170/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Tebo	61.495
5	PT. Wanakasita Nusantara	SK.1242/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021	Batanghari, Sarolangun	9.030
6	PT. Samhutani	SK. 751/Menhut-II/2014	Sarolangun	30.312
7	PT. Wana Perintis	SK.1120/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Batanghari, Sarolangun	7.104
8	PT. Jebus Maju	SK.1115/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Merangin	15.012
9	PT. Agronusa Alam Sejahtera	SK.642/MENLHK/SETJEN/HPL.2/6/2022	Batanghari, Sarolangun	23.729
10	PT. Alam Lestari Nusantara	SK.1237/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Sarolangun	10.785





No	Nama Pemegang Izin	Nomor SK	Lokasi	Luas (Ha)
11	PT. Limbah Kayu Utama	SK.1116/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Batanghari, Tebo	19.300
12	PT. Mugitriman International	SK.1118/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Bungo	37.500
13	PT. Malaka Agro Perkasa	SK.1117/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Bungo	24.485
14	PT. Hijau Artha Nusa	SK.1114/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Merangin, Sarolangun	32.620
15	PT. Gading Karya Makmur	SK.1113/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Sarolangun	27.703
16	PT. Delonix Lestari Raya	SK.1112/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Merangin	5.050
17	PT. Rimba Tanaman Industri	SK.1140/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Batanghari	7.290
18	PT. Rimba Hutani Mas	SK.1500/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Batanghari, Tanjung Jabung Barat	35.814
19	PT. Indomas	NIB. 81200141717790001	Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.	4.390
20	PT. Putra Duta Indah	SK.90/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022	Muaro Jambi	34.730
21	PT. Pesona Belantara	SK.91/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022	Muaro Jambi	21.315
22	PT. Restorasi Ekosistem Indonesia	SK.565/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2022	Batanghari Sarolangun	47.752
23	PT. Alam Bukit Tiga Puluh	SK.1195/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Tebo	38.665
Jumlah				809.552





Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5012/MenLHK-PHL/BRPH/HPL.0/6/2022 tentang Peta Arah Pemanfaatan Hutan Untuk Perizinan Berusaha pada areal HP/HPT seluas ± 138.574 Ha, terdapat 3 (tiga) Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Provinsi Jambi dengan keterangan 2 (dua) unit permohonan merupakan izin baru a.n. PT Wahana Elang Perkasa dan a.n. PT Merial Dino Plantarum serta 1 (satu) unit permohonan perluasan areal kerja a.n. PT Rimba Tanaman Industri. Daftar PBPH Hutan Alam dan PBPH Restorasi Ekosistem dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 9. Daftar Permohonan PBPH Baru di Provinsi Jambi

NO	NAMA PBPH	NOMOR BERITA ACARA PEMBUATAN KOORDINAT GEOGRAFIS BATAS AREAL	NOMOR PERSETUJUAN KOMITMEN PBPH	LUAS (± HA)
1.	PT Wahana Elang Perkasa	07/WEP/VII/2022	13072211111506001	22.212,95
2.	PT Merial Dino Plantarum	04/MDP/III/2023	14022311111502001	9.246
3.	PT Rimba Tanaman Industri	057/RTI/II/2023	13022311111504001	1.203
Jumlah Luas (± Ha)				32.661.95





d. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

Pada sektor hilir di wilayah BPHL IV Jambi terdapat PBPHH yang diberikan untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan sebanyak 36 PBPHH dengan berbagai macam kapasitas produksi. Berikut disajikan daftar PBPHH di Jambi :

Tabel 10. Daftar PBPHH di Provinsi Jambi

NO.	NAMA PBPHH	LOKASI PBPHH	SK IZIN/SERTIFIKAT STANDAR/TANGGAL	JENIS KAYU OLAHAN	KAPASITAS IZIN (M3)/THN
KAB. BATANGHARI					
Kapasitas < 2.000 M3 (skala kecil)					
1	CV. Hendi Saw Mill	Desa Sungai Rambai Kec. Muaro Tembesi Kab Batanghari	212 Tahun 2004/ 10 Mei 2004	Kayu Gergajian	1.500
2	CV. Alam Kusuma	Desa Muara Jangga Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari	315 Tahun 2004/ 21 Juli 2004	Kayu Gergajian	1.500
Kap. 2.000 sd < 6.000 M3 (Skala Menengah)					
3	Sri Untung Saw Mill	Jln. Baru RT. 02/01, Ds. Simpang Jelutih Kec. Batin XXIV Kab. Batanghari	246/Kep.Ka.BPMD/2017 / 29 Agustus 2017	Kayu Gergajian	5.500
4	CV. Betung Indah	Desa Betung Kec. Muaro Bulian Kab. Batanghari	207 Tahun 2004/ 10 Mei 2004	Kayu Gergajian	2.500
5	CV. Wana Jaya	Desa Sridadi Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari	208 Tahun 2004/ 10 Mei 2004	Kayu Gergajian	3.000





NO.	NAMA PBPBH	LOKASI PBPBH	SK IZIN/SERTIFIKAT STANDAR/TANGGAL	JENIS KAYU OLAHAN	KAPASITAS IZIN (M3)/THN
6	CV. Buana Aro Mas	Desa Bajubang Laut Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari	318 Tahun 2004/ 21 Juli 2004	Kayu Gergajian	5.400
7	PT. Buana Era Sentra Timber	Desa Penerokan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari	275/Kep.KA.BPMD- PPT/IX/2016 20 September 2016	Kayu Gergajian Veneer	1.900 4.000
8	PT. Wahana Inti Timber	Desa Kembang Seri Baru RT 8 Kec. Muaro Sebo Kab. Batanghari	245/KEP.KA/DPM/2017 29 Agustus 2017	Veneer	5.500
9	CV. Nindilia Kirana	Desa Mersam RT. 15 Kec. Mersam Kab. Batanghari	41/KEP.KA/DPM/2018 28 Februari 2018	Kayu Gergajian	5.900
10	PT. Karet Pulai Indonesia	Desa Malapari Kec. Muaro Bulian Kab. Batanghari	232/IUIPHHK/DPM-PTSP- 5/II/2018 31 Desember 2018	Kayu Gergajian Veneer	3.995 2.000
11	PT. Kabalen Jaya Persada	Kel. Simpang Karmeo Kec. Batin XXIV Kab. Batanghari	SK. 108/IUIPHHK/DPM- PTSP-5/IV/2020 22 April 2020 NIB 8120215271381 16 Juni 2020	Kayu Gergajian Veneer	3.400 2.500
12	CV. Samson	Desa Kuap Kec. Pemayang Kabupaten Batanghari	209 Tahun 2004/ 10 Mei 2004	Kayu Gergajian	6.000





NO.	NAMA PBP HH	LOKASI PBP HH	SK IZIN/SERTIFIKAT STANDAR/TANGGAL	JENIS KAYU OLAHAN	KAPASITAS IZIN (M3)/THN
13	CV. Buana Guna	Desa Sungai Pulai Kec. Muara Tembesi Kab. Batanghari	468/Kep.Gub/Dishut/2011 10 Oktober 2011	Kayu Gergajian	6.000
14	PT. Samhutani	Desa Tebing Tinggi Kec. Pelayung Kab. Batanghari	354 Tahun 2007 8 Oktober 2007	Kayu Gergajian	6.000
KAB. MUARO JAMBI					
Kapasitas < 2.000 M3 (skala kecil)					
15	Bintang Kartika Sawmill	Desa Sekernan Kec. Sakernan Kab. Muaro Jambi	216 Tahun 2004 10 Mei 2004	Kayu Gergajian	900
Kap. 2.000 sd < 6.000 M3 (Skala Menengah)					
16	Primkopad Korem 042	Desa Rukam Kec. Muaro Sebo Kab. Muaro Jambi	215 Tahun 2004 10 Mei 2004	Kayu Gergajian	3.000
17	Baijuri Haji Hamim	Desa Sengeti RT. III Kec. Sakernan Kab. Muaro Jambi	320 Tahun 2004 21 Juli 2004	Kayu Gergajian	3.000
18	PT. Lingga Karisma Jaya	Desa Sekernan Kec. Sakernan Kab. Muaro Jambi	324 Tahun 2004 21 Juli 2004	Kayu Gergajian	2.500
19	CV. Jambi Putra Seko	Desa Betung Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi	224 Tahun 2004 10 Mei 2004 diperbarui S.21/BPMD-PPT.4/2015 26 Februari 2015	Kayu Gergajian	1.800





NO.	NAMA PBP HH	LOKASI PBP HH	SK IZIN/SERTIFIKAT STANDAR/TANGGAL	JENIS KAYU OLAHAN	KAPASITAS IZIN (M3)/THN
20	CV. ZK Prima	Desa Sekernan Kec. Sakernan Kab. Muaro Jambi	483 Tahun 2004 25 November 2004 diperbarui S.152/BPMD-PPT.4/2015 10 Nopember 2015	Kayu Gergajian	4.500
21	Basirun Sawmill	Desa Sekernan RT. 02 Kec. Sakernan Kab. Muaro Jambi	314/Kep.KA/DPM-PTSP- 5/IUIPHHK/XI/2017 21 November 2017	Kayu Gergajian	5.500
22	Misran Sawmill	Desa Sekernan RT. 02 Kec. Sakernan Kb. Muaro Jambi	313/Kep.KA/DPM-PTSP- 5/IUIPHHK/XI/2017 21 November 2017	Kayu Gergajian	5.000
23	Nurbaiti Sawmill	Jln. Lintas Timur RT. 17 Kec. Sakernan Kab. Muaro Jambi	47/Kep.KA/DPM-PTSP - 5/IUIPHHK/III/2018 8 Maret 2018	Kayu Gergajian	3.000
24	PT. Pijoan Kusuma Raya	Jl. Jambi-Muaro Bulian RT desa Pijoan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi	242/IUIPHHK/DPM-PTSP- 5/XI/2019 26 November 2019	Kayu Gergajian	5.000
25	CV. H. Rozali Bersaudara	Desa Seponjen Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi	480 Tahun 2004 tgl 25 November 2004 diperbarui 42/Kep.Gub/BPMD- PPT/IUIPHHK/2013 25 April 2013	Kayu Gergajian	6.000
26	PT. Uni Wood Indonesia	Desa Pijoan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi	188.4.C/221/Kpts/Dishut/2009 21 Juli 2009	Kayu Gergajian	6.000





NO.	NAMA PBP HH	LOKASI PBP HH	SK IZIN/SERTIFIKAT STANDAR/TANGGAL	JENIS KAYU OLAHAN	KAPASITAS IZIN (M3)/THN
27	CV. Pesona Alam Sejahtera	Desa Sungai Gelam RT. 22 Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi	06/IUIPHHK/BPMD-PPT.4/II/2015 30 Januari 2015	Kayu Gergajian	6.000
KAB. TEBO					
Kapasitas < 2.000 M3 (skala kecil)					
28	Mulyadi	Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Kab. Tebo	96/1500/IUIPHHK/P/2012 28 Agustus 2012	Kayu Gergajian	1.900
Kap. 2.000 sd < 6.000 M3 (Skala Menengah)					
29	CV. Gajah Unggul	Desa Tanjung Dani Kec. Sumay Kab. Tebo	331 Tahun 2004 21 Juli 2004	Kayu Gergajian	4.500
30	CV. Wana Griya Lestari	Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo	333 Tahun 2004 21 Juli 2004	Kayu Gergajian	5.850
31	CV. Jati Tebo Mandiri	Desa Lubuk Madrasah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo	481 Tahun 2004 25 Nopember 2004	Kayu Gergajian	4.500
32	PT. Mahoni Agrasentosa	Desa Pelayang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo	482 Tahun 2004 25 Nopember 2004	Kayu Gergajian	5.000
33	CV. Citra Pandan Jaya	Desa Teluk Kualii Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo	03/15/IUIPHHK/2014 27 Januari 2014	Kayu Gergajian Veneer	1.000 4.500
34	PT. Jambi Persada Reksa	Desa Tengah Ulu Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo	219 Tahun 2004 10 Mei 2004	Kayu Gergajian	6.000





NO.	NAMA PBP HH	LOKASI PBP HH	SK IZIN/SERTIFIKAT STANDAR/TANGGAL	JENIS KAYU OLAHAN	KAPASITAS IZIN (M3)/THN
35	PT. Pelayang Indah	Desa Pelayang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo	332 Tahun 2004 21 Juli 2004	Kayu Gergajian	6.000
36	CV. Bukit Siguntang	Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo	315/Kep.Gub/Dishut/2010 14 September 2010	Kayu Gergajian	6.000
KAB. BUNGO					
Kapasitas < 2.000 M3 (skala kecil)					
37	CV. Aneka Karya	Desa Senamat Kec. Senamat kab. Bungo	335 Tahun 2004 21 Juli 2004	Kayu Gergajian	1.500
Kap. 2.000 sd < 6.000 M3 (Skala Menengah)					
38	CV. Empat Pilar Utama	Jln. Bangko Km. 35 Desa Bukit Apit Kab. Bungo	221 Tahun 2004 10 Mei 2004	Kayu Gergajian	4.500
39	CV. Sari Alam Mulia	Desa Senamat Km 23 Kec. Senamat Kab. Bungo	337 Tahun 2004 21 Juli 2004	Kayu Gergajian	4.500
40	PT. Sukses Jujuhan Sakti	Desa Senamat Kec. Pelepat Kab. Bungo	484 Tahun 2004 25 November 2004	Kayu Gergajian	3.000
41	PT. Kendi Arindo	Desa Mulya Jaya Kec. Pelepat Kab. Bungo	182/KEP.KA/DPM/2017 11 Juli 2017	Kayu Arang	5.040
42	PD. Rahmat	Jl. Baru Desa Rantau Kelayang Kec. Pelepat Kab. Bungo	09/IUIPHHK/BPMD-PPT.4/II/2015 9 Februari 2005	Kayu Gergajian Veneer	3.000 3.000
KAB. MERANGIN					





NO.	NAMA PBP HH	LOKASI PBP HH	SK IZIN/SERTIFIKAT STANDAR/TANGGAL	JENIS KAYU OLAHAN	KAPASITAS IZIN (M3)/THN
Kapasitas < 2.000 M3 (skala kecil)					
43	M. Iqbal Ardiansyah	Desa Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin	NIB 1305220025715 13 Mei 2022	Kayu Gergajian	1.900
Kap. 2.000 sd < 6.000 M3 (Skala Menengah)					
44	KUD. Catur Karya	Desa Kubang Ujo II Kec. Pamenang Kab. Merangin	223 Tahun 2004 10 Mei 2004	Kayu Gergajian	3.000
45	PT. Jelutung Jumbo Jaya	Jln. Lintas Sumatera Km14 Desa Simpang Limbur Kec. Pamenang Kab. Merangin	1884.C/335/Kpts/Dishut/2010 tgl 15 Juli 2010 diperbarui SK. 18/IUIPHHK/DPM-PTSP/II/2020 13 Januari 2020	Kayu Gergajian	3.000
				Veneer	2.900
46	CV. Agung Jaya Utama	Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin	325 Tahun 2004 21 Juli 2004 diperbarui 89/1500/IUIPHHK/II/2012 13 Agustus 2012	Kayu Gergajian	3.000
47	CV. Jebus Jaya Raya	Desa Pulau Aro Kec. Tabir Barat Kab. Merangin	319 Tahun 2004 tgl 21 Juli 2004 diperbarui dengan 17/15/IUIPHHK/II/2013 25 Maret 2013	Kayu Gergajian	4.500





NO.	NAMA PBPBH	LOKASI PBPBH	SK IZIN/SERTIFIKAT STANDAR/TANGGAL	JENIS KAYU OLAHAN	KAPASITAS IZIN (M3)/THN
48	CV. Harapan Bersama	Desa Pulau Rengas Ilir Kec. Bangko Barat Kab. Merangin	341/Kep.KA.BPMD-PPT- 4/2016 14 November 2016	Kayu Gergajian	3.000
49	CV. Rimbun Gede	Desa Renah Medan Kec. Renah Pembarat Kab. Merangin	330 Tahun 2004 tgl 21 Juli 2004 diperbarui SK. 08/15/UIIPHHK/II/2013 tgl 5 Maret 2013 diperbarui SK. 82/Kep. DPM &PTSP/II/2017 27 Februari 2017	Kayu Gergajian	4.500
50	CV. Sinar Pangi	Desa Kampung Limo Kec. Pangkalan Jambu Kab. Merangin	348/Kep.KA.BPMD-PPT- 4/2016 15 Desember 2016	Kayu Gergajian	4.500
51	CV. Anja Belawan	Desa Mentawak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin	200/Kep.KA.BPMD-PPT- 5/2018 21 November 2018	Kayu Gergajian	5.900
52	CV. Sari Alam Mulia	Desa Koto Rayo Kec. Tabir Kab. Merangin	119/UIIPHHK/DPM-PTSP- 5/V/2020 11 Mei 2020	Kayu Gergajian Veneer	2.500 3.400
53	CV. Mitra Kami	Desa Pulau Rengas Ulu Kec. Bangko Barat Kab. Merangin	NIB. 1510210010779 KBLI 16214 Industri Veneer 8 Maret 2022	Veneer	4.000





NO.	NAMA PBPBH	LOKASI PBPBH	SK IZIN/SERTIFIKAT STANDAR/TANGGAL	JENIS KAYU OLAHAN	KAPASITAS IZIN (M3)/THN
			KBLI 16101 Kayu Gergajian 29 Maret 2022	Kayu Gergajian	1.900
54	CV. Berkat Tabah Jaya Mandiri	Desa Aur Berduri Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin	NIB. 1312210027692 Sertifikat Standar Nomor 13122100276920011 31 Mei 2022	Kayu Gergajian	5.900
55	PT. Pemenang Indah Permai	Desa Pamenang Kec. Pamenang Kab. Merangin	222 Tahun 2004 10 Mei 2004	Kayu Gergajian	6.000
KAB. SAROLANGUN					
Kapasitas < 2.000 M3 (skala kecil)					
56	CV. Karya Utama	Desa Lubuk Kepayang Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun	346 Tahun 2004 21 Juli 2004	Kayu Gergajian	1.500
57	CV. Dua Enam	Desa Karang Mendapo Kec. Pauh Kab. Sarolangun	348 Tahun 2004 21 Juli 2004 diperbarui 522.21/3717/2005 19 Agustus 2005	Kayu Gergajian	1.500
58	Sudarni	Desa Mandiangi Kec. Mandiingin Kab. Sarolangun	1212000720989 8 Juli 2021	Kayu Gergajian	1.900
Kap. 2.000 sd < 6.000 M3 (Skala Menengah)					
59	CV. Pauh Rimba Abadi	Kel. Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun	63/KEP.KA/DPM- PTSP.5/IUIPHHK/III/2018 21 Maret 2018	Kayu Gergajian	5.900





NO.	NAMA PBP HH	LOKASI PBP HH	SK IZIN/SERTIFIKAT STANDAR/TANGGAL	JENIS KAYU OLAHAN	KAPASITAS IZIN (M3)/THN
60	CV. Belato Jaya	Desa Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun	342 Tahun 2004 21 Juli 2004	Kayu Gergajian	3.000
61	PT. Pauh Rimba Raya	Desa Gurun Mudo Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun	431/Kep.Gub/Dh/2009 2 November 2009	Kayu Gergajian	3.000
62	CV. Wira Kayu Abadi	Desa Gurun Tuo Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun	61/Kep.Gub/Dh/2011 tgl 8 Pebruari 2011 diperbarui 118/KEP.BPMD/2016 2 Mei 2016	Kayu Gergajian	4.500
63	PT. Gema Nusa Lestari	Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun	97/IUIPHHK/2019 24 April 2019	Veneer	5.900
64	CV. Rizky Saudara	Desa Lubuk Sayak Kec. Pelawan Kab. Sarolangun	87/IUIPHHK/DPM-PTSP-5III/2020 30 Maret 2020	Kayu Gergajian	5.000
65	CV. Limbah Kayu Utama	Jl. Raya Batang Asai Desa Lubuk Sayak Kec. Pelawan Kab. Sarolangun	12.12.109/200/DPM-PTSP-5/IUIPHHK/IX/2020 25 September 2020	Kayu Gergajian	5.000
66	PT. Mesuji Jaya Bersama (desa Pauh)	Jl. Simpang Pitco Km4 Kel. Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun	12.12.109/54/DPM-PTSP-5/IUIPHHK/II/2021 9 Maret 2021	Kayu Gergajian	5.800
67	PT. Putra Limun Sejahtera	Bukit Canago Ds Mensao Desa Muara	12.12.109/61/DPM-PTSP-5/IUIPHHK/IV/2021	Kayu Gergajian	2.000





NO.	NAMA PBPBH	LOKASI PBPBH	SK IZIN/SERTIFIKAT STANDAR/TANGGAL	JENIS KAYU OLAHAN	KAPASITAS IZIN (M3)/THN
		Mensau Kec. Limun Kab. Sarolangun	16 April 2021	Veneer	3.900
68	PT. Furqon Jaya Mandiri	Dusun Berau Kel. Kampung Tujuh Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun	NIB 1260000661155 tgl 29 November 2021; Sertifikat Standar 12600006611550001 tanggal 29 November 2021	Kayu Gergajian Veneer	3.900 2.000
69	CV. Azka Putra Jaya	Dusun Taman Sari Desa Agro Sari Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun	NIB. 0810210018942 Sertifikat Standar Nomor 08102100189420007 tanggal 20 Juni 2022	Veneer	5.900
70	PT. Mesuji Jaya Bersama (Desa Samaran)	Jl. Simpang Ptco Km 3 RT 07/Rw 04 Desa Samaran Kec. Pauh Kabupaten Sarolangun	NIB. 0288010241589 Sertifikat Standar Nomor 02880102415890001 tanggal 17 Mei 2022	Kayu Gergajian	5.800
71	CV. Air Hitam Baru	Desa Lubuk Kepayang Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun	343 Tahun 2004 21 Juli 2004	Kayu Gergajian	6.000
72	PT. Cahaya Singkutindo	Desa Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun	485 Tahun 2004 tgl 25 November 2004 diperbarui 522.21/1812/2005 25 April 2005	Kayu Gergajian	6.000
73	PT. Samhutani	Desa Lubuk Napal Kec. Pauh Kab. Sarolangun	486 Tahun 2004 tgl 25 November 2004	Kayu Gergajian	6.000





NO.	NAMA PBPBH	LOKASI PBPBH	SK IZIN/SERTIFIKAT STANDAR/TANGGAL	JENIS KAYU OLAHAN	KAPASITAS IZIN (M3)/THN
KAB. TANJABBAR					
Kapasitas < 2.000 M3 (skala kecil)					
74	PT. Bumi Teguh Pertiwi	Desa Tebing Tinggi Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjabbar	350 Tahun 2004 21 Juli 2004	Kayu Gergajian	1.500
Kap. 2.000 sd < 6.000 M3 (Skala Menengah)					
75	CV. Risen Mandiri	Desa Kampung Baru Dusun Tuo (Pesapuan) Kec. Merlung Kab. Tanjabbar	349 Tahun 2004 tgl 21 Juli 2004 diperbarui 522.21/4406/2007 10 Oktober 2007	Kayu Gergajian	6.000
76	Rimba Harapan Sawmill	Jln. Harapan No. 5 Kuala Tungkal Kab. Tanjabbar	351 Tahun 2004 21 Juli 2004	Kayu Gergajian	6.000
77	CV. Sari Hijau Mutiara	Jl. S. Parman 20 Desa Taman Raja Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjabbar	488 Tahun 2004 25 November 2004	Kayu Gergajian	6.000
KAB. KERINCI					
Kap. 2.000 sd < 6.000 M3 (Skala Menengah)					
78	PT. Karya Kerinci Seblat	Desa Jernih Raya RT 04 Kec. Gunung Tujuh Kab. Kerinci	20/KEP.KA.BPMD-4/2016 15 Januari 2016	Veneer	4.000
KOTA JAMBI					
Kapasitas < 2.000 M3 (skala kecil)					





NO.	NAMA PBP HH	LOKASI PBP HH	SK IZIN/SERTIFIKAT STANDAR/TANGGAL	JENIS KAYU OLAHAN	KAPASITAS IZIN (M3)/THN
79	CV. Conta Dora	Jl. KH Saleh RT 01 Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi	228 Tahun 2004 10 mei 2004	Kayu Gergajian	1.500
80	CV. Indra Jaya	Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi	229 Tahun 2004 10 Mei 2004	Kayu Gergajian	1.500
81	Ahmad Rivai Saw Mill	Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi	230 Tahun 2004 10 Mei 2004	Kayu Gergajian	1.500
82	Haji Hasan Jalal	Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi	326 Tahun 2004 21 Juli 2004	Kayu Gergajian	900
83	CV. Anang Fahmi Jaya	Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi	328 Tahun 2004 21 Juli 2004	Kayu Gergajian	1.500
84	CV. Hasanah	Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi	1884.C/334/Kpts/Dishut/2010 15 Juli 2010	Kayu Gergajian	720
85	Raden S. Ansori HT	Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi	1884.C/31/Kpts/Dishut/2011 14 Januari 2011	Kayu Gergajian	900
86	Muhammad Hasan	Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi	1884.C/336/Kpts/Dishut/2011 28 Juni 2011	Kayu Gergajian	1.200
87	Marjohan Sawmill	Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi	12.12.109/09/II/2021 1 Februari 2021	Kayu Gergajian	2.000





NO.	NAMA PBPBH	LOKASI PBPBH	SK IZIN/SERTIFIKAT STANDAR/TANGGAL	JENIS KAYU OLAHAN	KAPASITAS IZIN (M3)/THN
Kap. 2.000 sd < 6.000 M3 (Skala Menengah)					
88	CV. Kahwa Jaya	Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi	327 Tahun 2004 21 Juli 2004	Kayu Gergajian	4.500
89	CV. Tri Tunggal	Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi	52/KEP.KA.BPMD-4/III/2015 1 Maret 2015	Kayu Gergajian	3.600
90	CV. Meranti Jaya Makmur	Kel. Pasir Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi	106/KEP.KA.BPMD-4/2015	Kayu Gergajian	2.200
JUMLAH TOTAL IZIN		90 PBPBH	TOTAL PROVINSI JAMBI		378.505

Sumber : MANTAP JAMBI diolah





e. GANISPH

Setiap hasil hutan dilakukan Pengukuran dan Pengujian meliputi volume/berat, penghitungan jumlah, dan penetapan jenis oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) sebagai dasar pengenaan PNBP atas pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan. Merujuk pada data tenaga teknis pengelolaan hutan (GANISPH) yang ada pada Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (SIGANISHUT) yang telah diolah tahun 2023, maka jumlah GANISPH yang bertugas di wilayah Provinsi Jambi terdapat sebanyak 378 kualifikasi yang terdiri dari 9 (sembilan) kualifikasi yaitu Perencanaan Hutan, Pembinaan Hutan, Pemanenan Hasil Hutan, Penguji Kayu Bulat, Penguji Kayu Gergajian, Penguji Kayu Lapis, Penguji Kelompok Batang, Penguji Kelompok Getah serta Pengukuran dan Perpetaan. Jumlah GANISPH per kualifikasi di Provinsi Jambi selengkapnya dapat dilihat pada berikut :

Tabel 11. Jumlah GANISPH Per Kualifikasi

No	Kualifikasi	Jumlah (orang)
1.	Perencanaan Hutan (CANHUT)	40
2.	Pembinaan Hutan (BINHUT)	31
3.	Pemanenan Hasil Hutan (NENHUT)	17
4.	Pengukuran dan Pemetaan (KURPET)	11
5.	Penguji Kayu Bulat (PKB)	214
6.	Penguji Kayu Gergajian (PKG)	36
7.	Penguji Kayu Lapis (PKL)	21
8.	Penguji Kelompok Minyak (JIPOKMIN)	1
9.	Penguji Kelompok Getah (JIPOKTAH)	7
Jumlah		378





Untuk Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) yang terdaftar penugasan pada Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (SIGANISHUT) di Provinsi Jambi terdapat 378 orang dan telah dilakukan Penilaian Kinerja GANISPH pada tahun 2023 dengan hasil sebagaimana rincian seperti terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 12. Hasil Penilaian Kinerja GANISPH di Provinsi Jambi pada tahun 2023

No	Kriteria Hasil Penilaian Kinerja GANISPH	Jumlah (orang)
1.	Layak	36
2.	Layak Dengan Pembinaan	245
3.	Tidak Hadir/Tidak Layak	58
4.	Tidak Layak	39
Jumlah		378



BAB II. CAPAIAN KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

Akuntabilitas Kinerja BPHL Wilayah IV Jambi Tahun 2022 merupakan perwujudan dari kewajiban BPHL Wilayah IV Jambi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. Akuntabilitas kinerja Tahun 2022 disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 yang dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan metode membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

Pelaksanaan kegiatan BPHL Wilayah IV Jambi Tahun 2022 didasari pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dalam pelaksanaannya didukung dengan DIPA BPHL Wilayah IV Jambi Tahun 2022. Target Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan Target Volume Rincian Output (RO) pada DIPA BPHL IV Jambi. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terdapat 14 target kinerja yang tertuang pada 2 (dua) Program yaitu Program Dukungan Manajemen terdiri dari 3 (tiga) Target RO, serta Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang terdiri dari 11 Target RO . Dari 14 Target Kinerja tersebut dapat terlaksana seluruhnya (persentase capaian 100%) sebagaimana tabel berikut :



Tabel 13. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase capaian
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
1	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100%
2	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
3	Layanan Sarana Internal	5 Unit	5 Unit	100%
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN				
4	HLN Forest Investment Program (FIP) II: Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
5	Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
6	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
7	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	100%
8	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	100%
9	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	100%
10	Fasilitasi dan Pembinaan Tertib Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	7 Badan Usaha	7 Badan Usaha	100%
11	Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan	11 Badan Usaha	11 Badan Usaha	100%
12	Fasilitasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah	8 Badan Usaha	8 Badan Usaha	100%
13	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	1 UMKM	1 UMKM	100%
14	Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	8 Badan Usaha	8 Badan Usaha	100%





Tabel 14. Realisasi Rencana Aksi BPHL Wilayah IV Jambi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi	31.814 Ha	43.702 Ha	137 %
2	Produksi hasil hutan	5.351.404 m3	5.526.425 M3	103 %
3	Volume hasil hutan kayu yang bersertifikat LK	3.746.196 m3	3.609.457 M3	96 %
4	Produksi komoditas HHBK	9.042 Ton	9.600 Ton	106 %
5	PNBP dari pemanfaatan hutan	Rp. 90.924.111.180	Rp. 55.146.319.473	60,7 %

Sumber : Satudata PHL, 4 Januari 2023

2. PROGNOSIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja tahun 2023 merupakan perwujudan komitmen balai untuk mencapai target kinerja yang dituangkan dalam target Rincian Output (RO) yang didukung dengan ketersediaan pendanaan DIPA balai sebagai bentuk capaian kinerja balai, berikut ditampilkan tabel prognosis capaian kinerja tahun 2023 :

Tabel 15. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Volume RO		
		Target	Prognosis	%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
1	Layanan Umum	1	1	100
2	Layanan Perkantoran	1	1	100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN LESTARI				
3	Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif	1	1	100
4	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	1	1	100



No	Indikator Kinerja	Volume RO		
		Target	Prognosis	%
5	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	1	1	100
6	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	2	2	100
7	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	7	7	100
8	Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	11	11	100
9	Pemantauan dan Evaluasi bidang Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	8	8	100
10	Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak	1	1	100
11	Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	8	8	100
12	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	1	1	100
13	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	1	1	100



B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

1. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2022

BPHL Wilayah IV Jambi dalam mencapai kinerjanya didukung pendanaan melalui dana DIPA BPHL Wilayah IV Jambi dengan capaian realisasi anggaran dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 16. Rincian Realisasi anggaran tahun 2022

No	Nama Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	<i>HLN Forest Investment Program (FIP) II : Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project</i>	885.750.000	885,661,350	99,99
2.	Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	370,299,000	370,167,603	99,96
3.	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	359,250,000	5,500	99,90
4.	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi yang diawasi dan dikendalikan	435,770,000	434,747,178	99,77
5.	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	449,929,000	449,729,891	99,96
6.	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	801,417,000	797,728,370	99,54
7.	Fasilitasi dan Pembinaan Tertib luran dan Peredaran hasil Hutan	169,348,000	169,060,219	99,83
8.	luran dan Penatausahaan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan	223,214,000	220,716,590	98,88
9.	Fasilitasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah	163,660,000	162,125,718	99,06





No	Nama Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
10.	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	253,600,000	253,222,959	99,85
11.	Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	329,095,000	328,283,566	99,75
12.	Layanan Umum	162.500.000	162.154.200	99,79
13.	Layanan Perkantoran	6.115.467.000	5.898.149.008	96,45
14.	Layanan Sarana Internal	29.614.000	29.614.000	100,00
Total		10,913,000	10,235,720	97,87

Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 10,490,235,720,- (97,87%) merupakan realisasi pada 14 Rincian Output (RO) kegiatan yang terdiri dari 11 RO kegiatan teknis balai dan 3 RO kegiatan umum perkantoran. Rata-rata realisasi anggaran pada pelaksanaan RO kegiatan teknis sebesar 99.08 % hal tersebut didukung oleh perencanaan kegiatan teknis yang memadai, SDM balai yang memadai, koordinasi dengan para pihak terkait pelaksanaan kegiatan yang baik, diantaranya adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, KPHP Lingkup Provinsi Jambi, serta Pemerintah Daerah dan unit manajemen yang ada di Provinsi Jambi. Pada kegiatan umum perkantoran rata-rata realisasi anggaran sebesar 96,54% dikarenakan adanya anggaran yang tidak terealisasi diantaranya adalah gaji dan tunjangan pegawai.



2. Prognosis Capaian Anggaran Tahun 2023

Prognosis Capaian Anggaran Tahun 2023 BPHL Wilayah IV Jambi dalam mencapai kinerjanya tentunya didukung melalui pendanaan berdasarkan DIPA BPHL Wilayah IV Jambi dengan prognosis capaian anggaran tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 17. Prognosis Capaian Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran		
		Target	Prognosis	%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
1	Layanan Umum	179,559,000	179,559,000	100
2	Layanan Perkantoran	6,392,308,000	6,392,308,000	100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN LESTARI				
3	Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif	214,788,000	214,788,000	100
4	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	230,777,000	230,777,000	100
5	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	218,156,000	218,156,000	100
6	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	88,156,000	88,156,000	100
7	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	1,009,906,000	1,009,906,000	100
8	Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	689,614,000	689,614,000	100
9	Pemantauan dan Evaluasi bidang Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	117,009,000	117,009,000	100
10	Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak	162,034,000	162,034,000	100
11	Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	226,643,000	226,643,000	100



No	Indikator Kinerja	Anggaran		
		Target	Prognosis	%
12	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	171,683,000	171,683,000	100
13	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	295,745,000	295,745,000	100

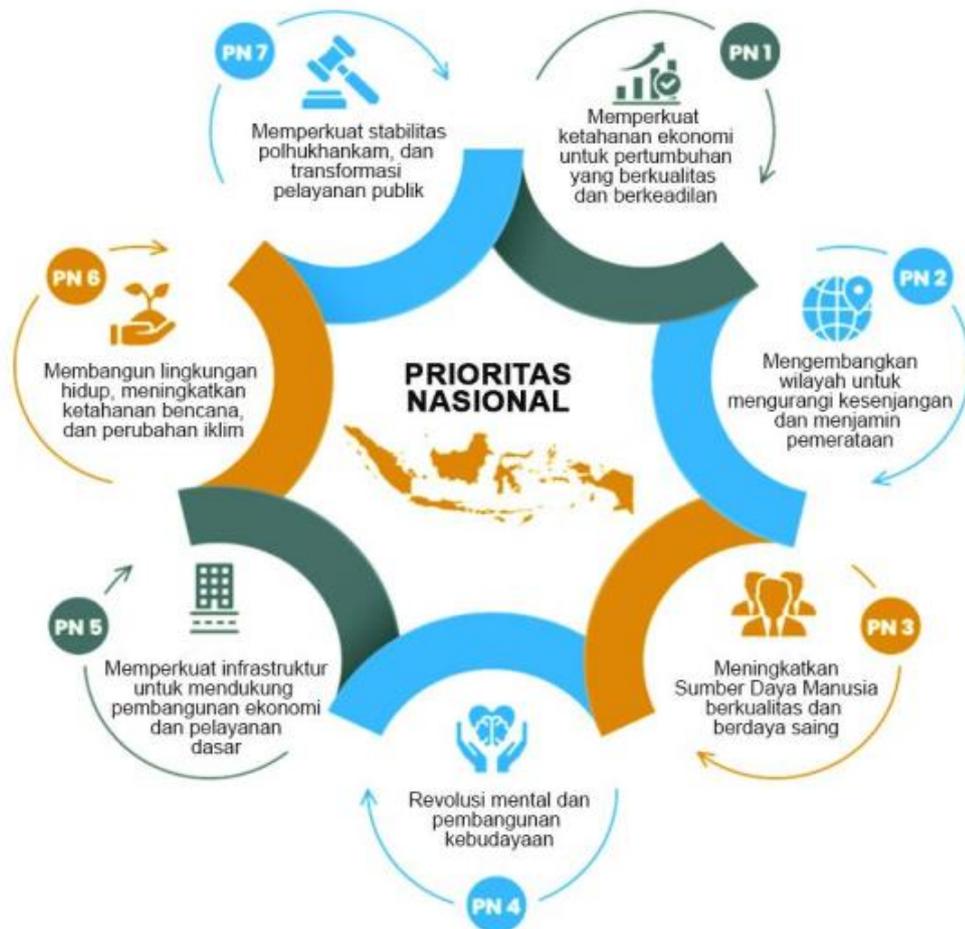
Realisasi Pelaksanaan anggaran tahun DIPA BPHL IV Jambi Tahun 2023 sebesar Rp. 9,994,230,744,- (99,98%) merupakan realisasi pada 13 Rincian Output (RO) yang terdiri dari 11 RO pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan 2 RO pada Program Dukungan Manajemen. Rata-rata realisasi anggaran pada pelaksanaan seluruh RO 99.98 % hal tersebut didukung oleh perencanaan kegiatan teknis yang memadai, SDM balai yang memadai, koordinasi dengan para pihak terkait pelaksanaan kegiatan yang baik, diantaranya adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, KPHP Lingkup Provinsi Jambi, serta Pemerintah Daerah dan unit manajemen yang ada di Provinsi Jambi. Dari hasil analisis efisiensi pelaksanaan anggaran dengan metode membandingkan persentase capaian anggaran dan persentase capaian output pada masing – masing RO, maka dari 13 RO yang dilaksanakan pada BPHL IV Jambi tahun 2023 seluruhnya dapat dikategorikan efisien (Nilai efisiensi ≤ 1). Hal ini memberikan kesimpulan bahwa dari pelaksanaan anggaran yang ada pada DIPA BPHL IV Jambi Tahun 2023 telah dapat memberikan capaian output yang efisien sesuai yang telah direncanakan. (diambil dari LKj 2023)



BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2024

A. STRATEGI DALAM MEMBANGUN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024

Dalam mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024 yang bertujuan untuk mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan maka BPHL Wilayah IV Jambi mengacu strategi pembangunan prioritas nasional tahun 2024. Berikut ditampilkan gambar strategi Prioritas Nasional PHL tahun 2024 :



Gambar 1. Strategi Prioritas Nasional



B. PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2024

Kebijakan Redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP) sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, melalui penyeragaman nomenklatur Program Dukman dan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan merupakan dasar perubahan kebijakan penyusunan perencanaan kegiatan lingkup Ditjen PHL yang dimulai sejak penyusunan RENSTRA DITJEN PHL periode Tahun 2020 – 2024. Kebijakan RSPP tersebut dilakukan melalui metode Cascading program yang ada di lingkup Ditjen PHL ke lingkup Direktorat dibawahnya serta Satker (balai) lingkup Ditjen PHL.

Dengan adanya Reorganisasi Balai Pengelolaan hutan Lestari melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari, tugas balai adalah melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyelenggarakan fungsi Balai sesuai peraturan tersebut.

Guna menunjang Tugas dan Fungsi tersebut maka perencanaan program yang akan dilaksanakan oleh balai merupakan *Cascading* dari program yang dilaksanakan Ditjen PHL. Indikator Kinerja Program Ditjen PHL yang merupakan target pelaksanaan di tiap Direktorat Lingkup Ditjen PHL kemudian diturunkan lebih lanjut dalam perencanaan Balai melalui pelaksanaan RO (Rencana Operasional) (pelaksanaan RO menunjang target IKK tiap direktorat) sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :





Tabel 18. Rencana Operasional BPHL Wilayah IV Jambi

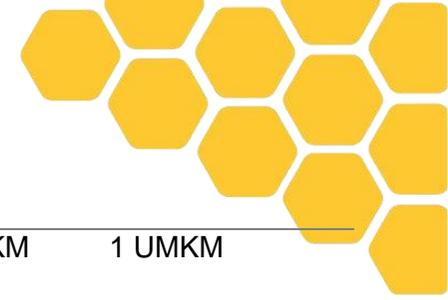
Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program Ditjen PHL	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincaian Output Balai	Target RO	Lokus Kegiatan
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Menurunnya laju penyusutan hutan.	Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan.	KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan; (Dit. BRPH)	Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan	1 Lembaga	KPHP Unit XV Tanjung Jabung Barat
			Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari. (Dit. BRPH)	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	1 Lembaga	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII UPTD KPH Merangin Unit IV, V dan VI
			Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan; (Dit.PUPH)	Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH	3 Badan Usaha	PT. Agronusa Alam Sejahtera PT. Putra Duta Indah Wood PT. Pesona Belantara Persada





Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku).	Jumlah produksi kayu bulat.	Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan.	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	2 Badan Usaha	2 Unit Pemegang Komitmen PBPH
		Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu	Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	3 Badan Usaha	PT. Agronusa Alam Sejahtera PT. Lestari Asri Jaya PT. Wirakarya Sakti
		Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan.	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	3 Badan Usaha	PT. Wana Perintis PT. Agronusa Alam Sejahtera PT. Lestari Asri Jaya
Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting.	Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan.	Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	9 Badan Usaha	9 Unit PBPHH





		UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK.	UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL	1 UMKM	1 UMKM
Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Meningkatnya PNBPNBP dari Pemanfaatan Hutan.	Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan;	Pengawasan dan Pengendalian PNBPNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	12 Badan Usaha	12 Badan Usaha PBPH / PBPHH
		Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT.	Layanan Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	8 Badan Usaha	8 unit PBPH / PBPHH
Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata.	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat.	Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.	Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok Masyarakat	PT. Agronusa Alam Sejahtera; PT Wirakarya Sakti





Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Layanan Umum	1 Layanan
			Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel	Layanan Perkantoran	1 layanan
			Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Layanan Sarana Internal	50 Unit





Pelaksanaan Kegiatan BPHL Wilayah IV Jambi didukung dengan pendanaan DIPA BPHL Wilayah IV Jambi Tahun 2024 sebesar Rp. 11.843.189.000, Struktur anggaran per kegiatan pada BPHL Wilayah IV Jambi Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 19. Struktur anggaran per kegiatan

KEGIATAN	PAGU (Rp)
6729. Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	1,301,688,000
6730. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	200,563,000
6731. Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	1,904,218,000
6732. Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	589,797,000
6733. Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	1,162,118,000
5396. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	6,684,805,000

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (5396)

Pelaksanaan Kegiatan Dukungan manajemen BPHL Wilayah IV Jambi Tahun 2024 adalah dalam rangka mendukung sasaran kegiatan berupa Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Pencapaian sasaran kegiatan ini memiliki indikator kinerja kegiatan berupa :

1. Nilai SAKIP BPHL Wilayah IV Jambi mendukung capaian SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Degan target nilai 82 poin
2. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel



- 
3. Level Maturitas SPIP BPHL Wilayah IV Jambi dalam mendukung Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari pada Level “Memadai”

Upaya pencapaian IKK tersebut diturunkan lebih lanjut pada pelaksanaan Rencana Operasional (RO) pada BPHL Wilayah IV Jambi melalui rencana pelaksanaan RO :

1. Layanan Umum dengan target sebesar 1 layanan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 70,596,000,- dilaksanakan melalui aktivitas penyusunan Program dan penyusunan rencana anggaran BPHL IV Jambi , serta aktivitas penunjang pelaksanaan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, Perencanaan dan BMN.
2. Layanan perkantoran yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6,480,688,000, dilaksanakan melalui aktivitas pembayaran gaji dan tunjangan bagi ASN dan PPPK Lingkup BPHL IV Jambi, serta operasional dan pemeliharaan kantor.
3. Layanan Sarana Internal melalui aktivitas pengadaan peralatan fasilitas perkantoran yang didukung anggaran sebesar Rp. 133,521,000

2. Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan (6729)

Peningkatan perencanaan pemanfaatan hutan merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BPHL Wilayah IV Jambi dalam Upaya mendukung pencapaian sasaran program berupa Menurunnya laju penyusutan hutan. Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah :

1. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan yang diwujudkan dari pelaksanaan Rencana Operasional Fasilitas Rencana Pengelolaan Hutan dengan target sebanyak 1 lembaga KPH yang terfasilitasi penyusunan RPHJP





selama tahun 2024. Kondisi hingga tahun 2024 masih terdapat 2 unit KPH lingkup Provinsi Jambi yang belum memiliki RPHJP yang disyahkan yaitu KPHP Unit XV Tanjung Jabung Barat dan KPHP Unit XII Batanghari, sehingga fokus dari pelaksanaan fasilitasi perencanaan tahun 2024 adalah pada salah satu unit KPH tersebut. Pelaksanaan Fasilitasi dilaksanakan melalui aktivitas pembinaan dan evaluasi perencanaan KPH (RPHJP/RPHJPD), Fasilitasi penyusunan dan pengesahan RPHJP dan Workshop Penyusunan RPHJPD KPH Tahun 2025. Anggaran yang mendukung pelaksanaan RO ini sejumlah Rp. 1,062,131,000.

2. serta Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang Lestari dilaksanakan melalui RO Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari dengan target 1 Lembaga KPH. Hingga tahun 2023 sebanyak 3 Unit KPH Lingkup Provinsi Jambi telah memperoleh predikat KPH Efektif, dan ditargetkan pada tahun 2024 terdapat 1 unit KPH yang memperoleh predikat KPH Efektif. Pelaksanaan RO ini diwujudkan dalam aktivitas Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat, Fasilitasi Penilaian KPH Efektif, Workshop Penyiapan Penilaian KPH Efektif, dan Fasilitasi Usaha Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat pada Wilayah KPH. Anggaran guna mendukung realisasi RO ini sebesar Rp. 239,557,000

3. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan (6730)

Peningkatan usaha pemanfaatan hutan merupakan salah satu kegiatan untuk mencapai sasaran program meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional. IKK yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan berupa Nilai





investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan meningkat yang diwujudkan melalui pelaksanaan RO Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan dengan target sebanyak 2 Badan Usaha pada tahun 2024. Pelaksanaan RO dilaksanakan melalui aktivitas :

- a. Fasilitasi Layanan Permohonan PBPH pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung, diantaranya adalah fasilitasi penerbitan Berita Acara Koordinat Geografis sebagai salah satu pemenuhan komitmen pengajuan Perizinan PBPH Baru.
- b. Seminar Peluang Bisnis Pemanfaatan Areal Open Access pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jambi yang bertujuan untuk penyebarluasan informasi peluang investasi baru di dalam Kawasan hutan sesuai dengan peta arahan pemanfaatan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan RO tersebut didukung dengan anggaran DIPA sebesar RP. 200,563,000.

4. Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan (6731)

Kegiatan Peningkatan usaha Pemanfaatan Hutan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran program Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata. Indikator kinerja pelaksanaan Kegiatan ini berupa

1. Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat meningkat dan pada tahun 2024 direncanakan pelaksanaannya melalui RO Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan dengan target sebanyak 2 Kelompok Masyarakat. Aktivitas yang direncanakan dalam mencapai target RO tersebut diantaranya adalah Monitoring dan verifikasi Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan dan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Hutan





Bagi Kelompok Masyarakat di sekitar areal PBPH. Jumlah anggaran yang direncanakan untuk mendukung tercapainya target RO ini sebesar Rp. 122,165,000

2. Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan, pada tahun 2024 dilaksanakan melalui pelaksanaan RO Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan berusaha pemanfaatan hutan dengan target RO sebanyak 3 Badan Usaha. Aktivitas pelaksanaan RO untuk mencapai target tersebut dilaksanakan berupa Bimtek implementasi Multiusaha Kehutanan, Bimtek pengelolaan hutan pola kemitraan masyarakat pada PBPH, workshop penyusunan kemitraan kehutanan pada PBPH, Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan multiusaha kehutanan/ perlindungan hutan dan kemitraan kehutanan pada PBPH serta Fasilitasi pengembangan kapasitas masyarakat dalam mendukung Multiusaha Kehutanan. Pelaksanaan RO ini didukung dengan anggaran sebesar RP. 646.638.000,-
3. Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan dijabarkan dalam pelaksanaan RO Fasilitasi Implementasi RKUPH / RKTPH dengan target sebanyak 3 Badan Usaha. Pelaksanaan RO dilaksanakan melalui pelaksanaan aktivitas Monitoring realisasi kegiatan penanaman pada PBPH, Bedah Kinerja Pemegang PBPH dan Sosialisasi peraturan tentang tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan. Aktivitas pelaksanaan RO tersebut didukung dengan anggaran sebesar Rp. 749.702.000,-

5. Peningkatan Tertib iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (6732)

Kegiatan Peningkatan tertib iuran dan penatausahaan hasil hutan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran program Meningkatnya Penerimaan Negara





Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan hutan. Indikator kinerja pelaksanaan Kegiatan ini dapat diukur dari Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan hutan, untuk tahun 2024 direncanakan pelaksanaan kegiatan melalui RO sebagai berikut :

1. Fasilitasi dan Pembinaan Tenaga Profesional, Tertib Pelaksanaan Iuran Kehutanan dan Penatausahaan Hasil Hutan dengan target 8 badan usaha. Kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target RO tersebut yaitu Pembentukan GANISPH HHBK bagi Persetujuan Perhutanan Sosial, dan Pembinaan Kinerja Tenaga Teknis dan optimalisasi PNBP. Jumlah anggaran yang direncanakan untuk mendukung tercapainya target RO ini sebesar Rp. 195.465.000.-
2. Rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi penilaian kinerja tenaga profesional, tertib pelaksanaan iuran kehutanan dan penatausahaan hasil hutan dengan target 12 badan usaha. Kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target RO tersebut yaitu Pemantauan dan evaluasi kinerja tenaga teknis, tertib pelaksanaan iuran kehutanan dan penatausahaan hasil hutan serta kegiatan Bimbingan teknis peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan. Jumlah anggaran yang direncanakan untuk mendukung tercapainya target RO sebesar Rp. 394.332.000.-

6. Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan (6733)

Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan hasil Hutan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran program Meningkatkan nilai ekspor produk hasil hutan. Indikator kinerja pelaksanaan Kegiatan ini dapat diukur dari Nilai ekspor produk





hasil hutan, untuk tahun 2024 direncanakan pelaksanaan kegiatan melalui RO sebagai berikut :

1. Fasilitasi /sosialisasi/pendampingan/Bimbingan teknis Usaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah dengan target 9 badan usaha. Kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target RO tersebut yaitu Bimbingan teknis Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) bagi UMKM, Bimbingan teknis Sertifikasi Produk UMKM, dan FGD Perizinan bagi UMKM Kehutanan. Jumlah anggaran yang direncanakan untuk mendukung tercapainya target RO ini sebesar Rp. 322.519.000.-
2. Fasilitasi Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM o;eh BPHL dengan target 1 UMKM. Kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target RO tersebut yaitu Inventarisasi dan Verifikasi UMKM, Sertifikasi/Penilikan SVLK UMKM dan Bimbingan teknis untuk Pendampingan kelompok UMKM dan Sosialisasi Peraturan/Bintek SVLK. Jumlah anggaran yang direncanakan untuk mendukung tercapainya target RO sebesar Rp. 253.199.000.-
3. Pemantauan Kinerja Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan/Harga Pasar Produk Olahan Hasil Hutan. Kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target RO tersebut yaitu Bedah Kinerja Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Bersertifikat, Inhouse training Pengolahan Data dan Informasi Teknologi Lingkup Ditjen PHL dan Pemanatauan Perkembangan Harga Pasar Hasil Hutan Kayu lingkup Provinsi Jambi Jumlah anggaran yang direncanakan untuk mendukung tercapainya target RO sebesar Rp. 586.400.000.-



PENUTUP

Demikian Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi Tahun 2024 agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan guna mendukung kegiatan bagi para pegawai pada kantor BPHL Wilayah IV Jambi dalam melaksanakan tugas sehari-hari sesuai bidang tugasnya dalam kurun waktu 1 tahun (1 Januari 2024 – 31 Desember 2024). Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini akan sangat tergantung pada kesungguhan semua pegawai dalam mengimplementasikan rencana-rencana kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal dan bermanfaat bagi pembangunan kehutanan secara umum.





LAMP IRAN



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Nurhidayat, S.Hut., M.Sc.

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2023

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
NIP. 19630807 198803 1 001

Pihak Pertama,

Wahyu Nurhidayat, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19700901 200003 1 004

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH IV JAMBI
 DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	82 Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Level 4
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel	1 Laporan
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak.	KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan	
		Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif	1 Lembaga
		Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari	
3	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan.	Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan	
		Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha
4	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan.	Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan	
		Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	3 Badan Usaha
		Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu	
5	Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	4 Badan Usaha
		Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	
6	Meningkatnya PNBPN dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok Masyarakat
		Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT	
		Pemantauan dan Evaluasi bidang Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	7 Badan Usaha
6	Meningkatnya PNBPN dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan	
		Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	11 Badan Usaha

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan.	Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK	
		Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	8 Badan Usaha
		Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	9 Badan Usaha
8	Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK	
		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL	1 UMKM

Anggaran :

Rp. 9.996.378.000

Jakarta, 15 Desember 2023

Plt. Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari,



Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
NIP. 19630807 198803 1 001

Kepala Balai,



Wahyu Nurhidayat, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19700901 200003 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Nurhidayat, S.Hut., M.Sc.

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
NIP. 19630807 198803 1 001

Wahyu Nurhidayat, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19700901 200003 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH IV JAMBI
 DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	83 Poin
		Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	98,29 Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Level 4
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel	1 Laporan
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak.	KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan	
		Fasilitasi rencana pengelolaan hutan	1 Lembaga
		Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari	
		Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	3 Lembaga
3	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan.	Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan	
		Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha
4	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan.	Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan	
		Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	3 Badan Usaha
		Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu	
		Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	6 Badan Usaha
5	Meningkatnya Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	
		Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH	3 Badan Usaha
6	Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.	Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	
		Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok Masyarakat
7	Meningkatnya PNBPN dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT	
		Layanan Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	8 Badan Usaha

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan	
		Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	12 Badan Usaha
8	Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan.	Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK	
		Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	9 Badan Usaha
		Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	12 Badan Usaha
9	Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK	
		UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL	1 UMKM

Anggaran :

Rp. 11.843.189.000

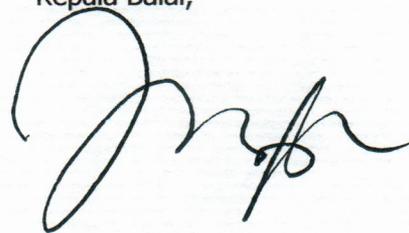
Jakarta, 15 Desember 2023

Plt. Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari,



Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
NIP. 19630807 198803 1 001

Kepala Balai,



Wahyu Nurhidayat, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19700901 200003 1 004